BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang biasa dikenal dengan UMKM telah diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jumlah UMKM hingga 2017 mencapai sekitar 62.922.617, dan dari data kementerian koperasi dan data UKM menunjukkan tingginya devisa negara dari para pelaku UMKM mencapai Rp 88,45 Miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat dibanding tahun 2016. Di Kabupaten Tulungagung sendiri jumlah UMKM berkembang sangat pesat mulai dari tahun 2013 hingga 2017 berjumlah 239.288 dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak yaitu sekitar 261.055 orang tenaga kerja (Badan Pusat Statistik Tulungagung, 2018).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang didapatkan (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum menurut Rochmat Soemitro (Tiswiyanti & Wendry (2019)) dan sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi budgetair, maka masyarakat sebagai warga negara yang baik dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Pemenuhan tuntutan pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut akan dapat dipenuhi jika wajib pajak memahami perpajakan dan dengan pemahaman tersebut maka wajib pajak akan dapat memenuhi dan mematuhi kewajiban perpajakan. Selain fungsi budgetair pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan dalam menopang pembiayaan pembangunan daerah. Apabila penerimaan pajak terus mengalami peningkatan maka proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan data APBN 2018 mengenai target penerimaan perpajakan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 10% menjadi Rp1.618,1 triliun di tahun 2018, selain itu pendapatan yang bersumber selain pajak sebesar Rp275,4 Triliun, dan pendapatan dari hibah sebesar Rp2,1 Triliun (www.kemenkue.go.id)

Pada tanggal 12 Juni 2013 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 yang kemudian di tanggal 1 Juli 2018 Peraturan Pemerintah diperbarui menjadi PP No 23 tahun 2018 tentang pajak UMKM baik badan maupun orang pribadi yang bertujuan memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, dan memberikan kesempatan khususnya UMKM untuk berkontribusi guna meningkatkan pendapatan negara. Dengan kata lain Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 merupakan pajak penghasilan yang diberlakukan untuk penghasilan tertentu dan merupakan pajak final sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) Final, dalam artian bahwa wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak lagi menghitung dan membayar pajaknya pada akhir tahun karena pajak tersebut telah dipotong pada saat penghasilan tersebut diperoleh. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif sebelumnya yaitu 1% dari omset menjadi 0,5% dari omset. Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan/atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 Miliar terbatas pada penghasilan dari usaha. Penerapan PP No 23 tahun 2018 ini menimbulkan pro dan kontra. Beberapa UMKM merasakan kemudahan dalam tarif yang harus dibayarkan yaitu dari 1% menjadi 0,5% dari omset yang didapatkan. Tetapi kemudahan dan penyederhanaan peraturan tersebut tidak sepenuhnya disambut baik dengan sebagian UMKM dikarenakan kebijakan tentang PPh Final 0,5% memiliki *grace period* atau batas waktu. Menurut Wahyudi & Mildawati (2020) sesuai dengan pasal 5 ayat (1) PP Nomor 23 tahun 2018 pemberian batasan waktu yang berbeda-beda kepada subjek pajak. Ini merupakan salah satu hal yang membedakan dengan peraturan sebelumnya. Adapun rinciannya sebagai berikut : (1) 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, (2) 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, *Commanditaire Vennotschap* (CV), atau firma, (3) 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Setelah batas waktu tersebut berakhir, wajib pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Kebijakan peraturan ini dinilai dapat meningkatkan penerimaan negara dari sector pajak penghasilan atau PPh.

Usaha untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Pada tahun

2015, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Sanksi administrasi yang dihapuskan adalah sanksi yang timbul akibat pelaporan, pembetulan, pembayaran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak Sebelumnya. Wajib pajak diberikan pengampunan atas kelalaian mereka dalam melaporkan pajak seperti kurang bayar dan tidak bayar. Pemberian fasilitas ini dimanfaatkan oleh wajib pajak sehingga banyak wajib pajak melaporkan pajak yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan. Hal tersebut membuktikan bahwa wajib pajak tidak melaporkan pajak karena memiliki ketakutan terhadap sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan pajak.

Persamaan penelitian ini dengan (Wahyudi & Mildawati, 2020) adalah menganalisis persepsi wajib pajak tentang PP No 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan perbedaannya terletak pada sample, yaitu pada penelitian ini menggunakan sample yang ada di Kabupaten Tulungagung. Hal ini dikarenakan Kabupaten Tulungagung merupakan daerah yang cukup banyak penyebaran UMKM di berbagai industri. Sehingga memunculkan penelitian ini yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sesuai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (studi kasus UMKM di Kabupaten Tulungagung)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis kepatuhan membayar pajak sesuai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 terhadap wajib pajak UMKM Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan membayar pajak sesuai Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 wajib pajak UMKM di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu mengenai perpajakan yang khususnya tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru maupun lama dan kepatuhan dalam membayar pajak
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai undang-undangan pajak sesuai peraturan pemerintah No 23 tahun 2018 kepada kalangan masyarakat
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada berbagai pihak khususnya UMKM untuk menambah wawasan mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga dapat membayar pajak dengan benar dan tepat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi untuk perpajakan agar bisa mensosialisasikan peraturan undang-undang perpajakan khususnya kepada UMKM agar bisa lebih paham dan patuh pada saat pembayaran pajak